

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan era reformasi di Indonesia, kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi semakin mendesak. Hal ini mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menginisiasi Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Mendapat Informasi Publik (KMIP) pada periode 1999-2004. Setelah melalui proses yang panjang, lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang mulai efektif diberlakukan pada 30 April 2010.

Penerapan UU KIP memerlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung hak setiap warga negara dalam memperoleh informasi. Dalam konteks ini, *website* "Legalitas" dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memegang peranan penting[1]. *Website* "Legalitas" digunakan untuk pencatatan administratif terkait pembentukan produk hukum, sedangkan *website* "PPID" dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan informasi publik.

Awalnya, kedua *website* ini dikembangkan menggunakan *framework* Zend. Namun, seiring berjalannya waktu, *framework* Zend menunjukkan beberapa keterbatasan dalam hal performa, keamanan, dan fleksibilitas pengembangan. Keterbatasan ini menghambat kemampuan aplikasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang dan menuntut efisiensi serta efektivitas yang lebih tinggi.

Framework Laravel, yang merupakan salah satu *framework* PHP terdepan, menawarkan berbagai keunggulan yang dapat mengatasi keterbatasan tersebut. Laravel dikenal dengan performa tinggi, tingkat keamanan yang kuat, serta kemudahan dalam pengembangan dan pemeliharaan *website* [2]. Migrasi ke Laravel 10 diharapkan dapat meningkatkan kinerja *website* "Legalitas"s dan "PPID", sehingga dapat mendukung implementasi UU KIP dengan lebih baik.

Pengembangan dan migrasi ini juga mencerminkan komitmen DPR dalam menyediakan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun, proses migrasi dari Zend ke Laravel 10 bukanlah tanpa tantangan. Oleh karena itu, laporan ini bertujuan untuk mengkaji proses migrasi tersebut, mengevaluasi manfaat yang diperoleh, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan lebih lanjut. Dengan demikian, website "Legalitas" dan "PPID" yang baru diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan sistem informasi publik yang lebih baik di Indonesia, mendukung prinsip-prinsip *good governance*, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Kerja magang ini dimaksudkan untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam pengembangan *website* berbasis web menggunakan *framework* Laravel 10. Tujuan utamanya adalah meningkatkan keterampilan teknis dan pemahaman mahasiswa tentang pengembangan perangkat lunak di industri. Mahasiswa akan belajar dan menguasai Laravel 10, serta melakukan migrasi website "Legalitas" dan "PPID" dari *framework* Zend ke Laravel 10 untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan pengembangan.

Adapun tujuan dari pelaksanaan kerja magang ini adalah sebagai berikut:

1. *Framework* Zend 2.0 sudah tidak lagi dikembangkan secara resmi. Oleh karena itu, migrasi ke Laravel, yang selalu mutakhir dan terus diperbarui, menjadi pilihan yang lebih baik untuk memastikan website tetap *up-to-date* dengan teknologi terbaru.
2. Laravel dikenal cukup mudah dipahami dan digunakan, terutama bagi pengembang yang sudah familiar dengan bahasa dasar PHP. Ini akan mempermudah pengembangan dan pemeliharaan *website*.
3. Laravel memungkinkan integrasi yang mudah dengan HTML, JavaScript, dan PHP secara vanilla. Hal ini penting untuk

memastikan bahwa *website* dapat berfungsi dengan baik dan memanfaatkan teknologi *website* modern.

4. Laravel memiliki dokumentasi yang baik dan struktur yang mudah dipahami, sehingga proyek ini dapat dengan mudah diwariskan kepada rekan baru atau tim pengembang lainnya di masa mendatang.
5. Meningkatkan kualitas dan kinerja *website* "Legalitas" dan "PPID", sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada publik, terutama dalam akses produk hukum seperti RUU dan Undang-Undang yang sudah dipublikasi.

Dengan demikian, program magang ini diharapkan dapat membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan pengalaman yang berharga, yang akan mendukung karier mereka di bidang teknologi informasi dan pengembangan perangkat lunak.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan magang MBKM berlangsung selama 150 hari (5 bulan), terhitung dari tanggal 13 Juli 2023 sampai 7 Desember 2023. Pelaksanaan kerja magang diadakan dengan tiga hari *Work From Office* (WFO) dan dua hari *Work From Home* (WFH). Berikut ini adalah prosedur pelaksanaan kerja magang.

1. Per 13 Juli 2023 sampai 10 November 2023, mahasiswa melaksanakan kerja magang secara *Work From Office* (WFO) dan *Work From Home* (WFH).
2. Pelaksanaan kerja magang secara WFO dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis, sedangkan untuk magang secara WFH dilaksanakan pada hari Selasa, Rabu dan Jumat.
3. Pelaksanaan kerja magang dimulai pada jam 08.30 sampai 17.30 untuk hari Senin sampai Kamis dengan waktu istirahat pada jam 12.00 sampai 13.00 selama satu jam.